

SULAWESI TENGGARA RAIH PERINGKAT 2 NASIONAL TERBANYAK SUSUN GDPK DARI BKKBN



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Sulawesi-Tenggara-Raih-Peringkat-2-Nasional-Terbanyak-Susun-GDPK-dari-BKKBN-RI.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih peringkat kedua nasional dari 38 provinsi di Indonesia, karena telah banyak menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Piagam penghargaan diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI. Di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (bangga kencana) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) ke-2 di Grand Sunshine Resor and Convention Soreang, Bandung, Jawa Barat.

Rakortek itu diselenggarakan BKKBN Kedeputusan Bidang Dalduk selama 4 hari, mulai 9-12 September 2024. Perwakilan BKKBN Sultra mengutus Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduknya, Sudirman, untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE dan Humas (Halakiemas) BKKBN Sultra, Mustakim, ada beberapa kiat dalam menyukseskan penyusunan GDPK di Sultra, sehingga bisa memperoleh piagam penghargaan sebagai juara II nasional.

Pertama, keberanian yang harus dimiliki saat memberikan advokasi ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. "Advokasi tidak hanya sebatas kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) saja, harus ke Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda), sekretaris daerah dan bila belum cukup ya ke bupatinya juga," ujarnya.

Kedua, beri alternatif jalan agar kabupaten kota yang minim APBD bisa menyusun GDPK dengan anggaran minimal tapi hasil maksimal. Untuk hal ini, Mustakim, berusaha menggandeng dan meyakinkan beberapa dosen yang punya kapasitas dalam penyusunan GDPK agar mau dengan biaya 30 persen dan keikhlasan 70 persen.

Ketiga, yakinkan pemerintah provinsi agar turut menyiapkan anggaran advokasi KIE ke kabupaten kota yang belum menyusun GDPK. Dengan cara ini, BKKBN Perwakilan menjadi sangat terbantu dalam upaya advokasi ke para pimpinan tingkat kabupaten/kota agar segera menyusun GDPK.

Keempat, hadapi tantangan dengan jiwa besar. Kadang tantangan muncul dari internal organisasi sendiri. Seperti yang pernah dialami Mustakim saat lakukan advokasi atau seminar penyusunan GDPK ke kabupaten kota. "Seringkali harus naik angkutan umum atau kendaraan pribadi ke kabupaten kota ketika yang dikerjakan dianggap bukan pekerjaan kantor hanya karena tidak dibiayai dari anggaran atau dipa kantor," bebarnya. Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKKBN, Tavip Agus Rayanto, membuka kegiatan tersebut sekaligus menjadi pembicara kunci. Rakortek diikuti seluruh tim Kedeputusan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat dan Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia.

"Kalau kita mengikuti arahan dari Bappenas, dalam kebijakan kependudukan, maka program-program yang berbasis kewilayahan ini jadi penting. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan once for all, satu kebijakan diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia."

"Karena itu, afirmasi kebijakan menjadi penting untuk wilayah-wilayah. Dengan cara mengidentifikasi tantangan-tantangan dan isu-isu di wilayah tersebut," ungkap Tavip saat memberikan arahan dan penyajian materinya. Tavip yang juga Sekretaris Utama BKKBN ini menekankan untuk menyukseskan pembangunan menuntut perubahan mindset.

Di sinilah perlunya peningkatan pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan. Dia mencontohkan penyusunan GDPK yang belum banyak menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

"Progam Bangga Kencana harus terus diperkuat dengan peningkatan yang lebih inovatif dan inklusif. Pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana yang efektif dan edukatif akan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pembangunan yang berkelanjutan," demikian Tavip menjelaskan

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/11/sulawesi-tenggara-raih-peringkat-2-nasional-terbanyak-susun-gdpk-dari-bkkbn>, “Sulawesi Tenggara Raih Peringkat 2 Nasional Terbanyak Susun GDPK dari BKKBN”, tanggal 11 September 2024.
2. <https://detiksultra.com/kendari/gdpk-sultra-raih-juara-ii-tingkat-nasional/>, “GDPK Sultra Raih Juara II Tingkat Nasional”, tanggal 11 September 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pada:

1. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan”.
2. Pasal 3:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
 - 1) penduduk tumbuh seimbang;
 - 2) manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - 3) keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - 4) keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - 5) administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya”.
3. Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:
 - a. pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. peningkatan kualitas penduduk;
 - c. pembangunan keluarga;
 - d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
 - e. penataan administrasi kependudukan.
4. Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu

dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat”.